

Pendekatan *Public Relations* Politik Bawaslu Buton Selatan dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

Approach to Political Public Relations Bawaslu of South Buton in Supervision of the 2019 Election Campaign

Rusli*, Fal. Harmonis & Amina Swarnawati

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta. Indonesia

Diterima: 15 Maret 2022; Direview: 15 Maret 2022; Disetujui: 23 April 2022

*Corresponding Email: rusliimm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pendekatan Public Relations Politik Bawaslu Buton Selatan dalam Kampanye Pemilu tahun 2019. Spesifik, salah satu tugas Bawaslu Buton Selatan adalah melakukan pengawasan kampanye pemilu tahun 2019. Disini peran strategis Pendekatan Public Relations Politik Bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap narasumber. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam melakukan pendekatan public relations Politik Bawaslu Buton Selatan ada tiga pendekatan yaitu pembangunan Komunitas Pengawasan yang di telah di bentuk di desa lawela kecamatan batauga, relasi Politik dan Publik dimana bawaslu dalam hal ini membangun rapat koordinasi internal dalam pembangunan sumberdaya manusia dan rapat kerja teknis serta dalam public eksternal bawaslu buton selatan membangun komunikasi formal berupa diskusi serta Paradigma Grunugian dimana bawaslu dalam hal ini telah melakukan koordinasi dalam memecahkan masalah bersama dan menemukan solusi bersama .

Kata Kunci: Bawaslu; Pemilu; Public Relations Politik; Pendekatan Publik Relation Politik

Abstract

This study aims to find out, explore and describe how the South Buton Bawaslu Political Public Relations approach in the 2019 Election Campaign. Specifically, one of the tasks of the South Buton Bawaslu is to supervise the 2019 election campaign. Here is the role of the South Buton Bawaslu Public Relations Approach. in supervising the 2019 election campaign in South Buton Regency. This research is a qualitative research with in-depth interviews with informants. The results of the study explain that in carrying out the political public relations approach of South Buton Bawaslu there are three approaches, namely the development of a Supervision Community that has been formed in Lawela village, batauga sub-district, Political and Public relations where Bawaslu in this case builds internal coordination in resource development and technical work meetings and in the external public, the Bawaslu of South Buton builds formal communication in the form of discussions and the Grunugian Paradigm where the Bawaslu in this case coordinates in solving common problems and finding joint solutions.

Keywords: Bawaslu; General Election; Political Public Relations; Political Public Relations Approach

How to Cite: Rusli, Harmonis, F., & Swarnawati, A., (2022). Pendekatan Public Relations Politik Bawaslu Buton Selatan Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. . *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(1): 194-209.



PENDAHULUAN

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pemilihan Umum tahun 2019 adalah wahana konsolidasi Demokrasi untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas. Proses penyelenggaraan pemilu adalah prasyarat penting dalam pemilu, agar hasil pemilu mendapatkan pengakuan yang baik dimasyarakat dalam membangun konsolidasi demokrasi. Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis dari awal. Dengan adanya pengawasan, kualitas pemilu di Negara mendapatkan kepercayaan dari aktor politik di dalam maupun di mata dunia Internasional (Siregar, 2020). Pemilihan Umum memiliki tahapan Kampanye dimana tahapan tersebut memberikan ruang yang besar bagi para kandidat untuk menyampaikan Visi-misi dan Program yang ditawarkan kepada konstituen Publik. Kerja-kerja politik yang memerlukan saluran politik terutama menjelang perhelatan politik berupa pemilu dan pilkada itu disebut kampanye. Kampanye itu jelas, terukur, dapat dirasakan, langsung aktifitas fisiknya bersifat laten, kritis dan menarik simpati masyarakat Firmanzah in (Efriza, 2019). Harus diakui bahwa ruang publik selama Pemilu serentak 2019 menjadi sangat kompleks dan dinamis, bahkan gaduh dan seringkali kontraproduktif bagi kualitas demokrasi, apalagi kesatuan dan persatuan bangsa. Ruang Publik penuh sesak tidak hanya kampanye yang bersifat negatif (negative campaign) tetapi juga black-campaign Firmanzah dalam (Kamal, 2021).

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu baru muncul pada 1982, tepatnya pada pelaksanaan pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan (panwaslak pemilu). Tuntutan Reformasi untuk pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat independen untuk meminimalisir campur tangan penguasa. Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu sejak terbitnya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu yang kewenangannya adalah mengawasi tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Untuk mencapai tujuan pemilihan umum tahun 2019 yang jujur, adil, langsung, umum, rahasia jujur dan adil penyelenggara pemilu harus memiliki integritas. Sehubungan dengan tujuan pemilu tersebut maka Bawaslu memiliki peranan penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis (Kriyantono, 2012).

Meskipun secara historis ada hubungan yang jelas antara hubungan masyarakat dan ranah politik, istilah hubungan politik dan masyarakat jarang digunakan (Jackson, 2010). Hubungan masyarakat PR adalah istilah yang diakui secara luas, dan aktor politik mengandalkan komunikasi untuk menjangkau khalayak untuk mereka, namun istilah hubungan politik dan masyarakat jarang digunakan. Namun, sepanjang sejarah ada hubungan yang jelas antara hubungan masyarakat dan ranah politiknya. Tetapi sebagai contoh awal, beberapa sumber mengidentifikasi penggunaan tablet batu oleh pemerintah untuk memberikan saran kepada petani yang sekarang disebut timur tengah (Guth and Mars, 2006). Penyebaran agama katolik di Eropa abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh teknik publik relations seperti dari mulut kemulut dan penggunaan awal mesin cetak. Penggunaan praktis publik relations disarankan oleh Moloney dalam (Kamal, 2021) ketika ia mencatat sebagai agen komunikasi publik relations memungkinkan kepentingannya yang berbeda untuk berinteraksi dan terlebih lagi ia mencatat bahwa dimana demokrasi telah menyebar ada banyak bukti publik relations. Sebagai bagian struktur demokrasi ini,

Davis in (Amrullohi, 2021) mengidentifikasi pentingnya pertumbuhan kelompok penekan yang menyuarakan keprihatinan individu, dan dengan demikian membentuk opini publik dan kebijakan publik. Publik relations dipengaruhi dan mempengaruhi politik, sistem pemerintahan dan debat politik dan perkembangan terakhir dalam publik relations membentuk hubungan ini. Hubungan masyarakat merupakan salah satu bentuk kelembagaan komunikasi sehingga memiliki sifat-sifat kelembagaan dengan ciri-ciri tertentu sebagai identitasnya. Para ilmuwan sepakat



bahwa identitas humas masa kini yang terus dimantapkan adalah model komunikasi dialogis, timbal balik, dan dua arah simetris dengan tujuan akhir yang khas pula, yaitu terciptanya hubungan harmonis, saling pengertian, dan saling menyenangkan antara organisasi dengan publiknya (Jayanti & Subyantoro, 2019).

Dalam Pemilihan Umum tentunya terdapat persaingan antara calon baik itu calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Persaingan tersebut tidak sedikit menimbulkan masalah dengan beredarnya Kampanye Hitam, Hoax, Sara, Politik Uang, keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa yang mengakibatkan Pemilihan Umum tidak menjadi konsolidasi demokrasi dan cenderung persaingan antara calon yang tidak sehat. Bawaslu buton selatan telah melakukan pengawasan pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan sebagai tanggung jawab dan amanah undang-undang.

Dalam hal ini BAWASLU BUTON SELATAN dituntut untuk bisa membangun hubungan harmonis dalam melakukan hubungan harmonis dengan publiknya. Publik relations politik dapat dipahami sebuah kekhususan proses public relations yang berupaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan komponen-komponen dan sumber daya politik untuk mengelola sejumlah isu agar mendapatkan perhatian, dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk memperoleh kesepahaman (*mutual understanding*) dengan berbagai pihak dalam upaya perwujudan tujuan politik dari sebuah organisasi. PR Politik adalah sebuah kerja melayani publik dengan membawa sejumlah isu untuk menjadi perhatian publik Frohlich, dalam (Iye, 2018b).

Bawaslu buton selatan harus mampu membangun hubungan yang baik dengan Publik agar terbangun hubungan yang baik dan saling percaya. Komunikasi menjadi penting dalam membangun sebuah hubungan agar tercipta Pemilihan Umum yang bermartabat. Dengan hal tersebut di atas bagaimana Bawaslu Buton Selatan melakukan Pendekatan Public Relations Politik terhadap Masyarakat agar masalah tersebut tidak terjadi dan menjadikan Pemilihan Umum tahun 2019 di Buton Selatan menjadi bermartabat?

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti untuk dijadikan rujukan. 2017 Penelitian oleh (Simanjuntak, 2017) dengan judul 'Pemantauan dalam proses penyelenggara pemilu' pemantauan lebih ditujukan untuk melawan bangkitnya kekuasaan rezim Orde Baru. Selanjutnya berkembang memberi masukan dalam pembuatan rancangan peraturan penyelenggaraan pemilu, pendataan pemilih, pemilu inklusif hingga publikasi hasil pemilu. Setelah pemilu 1999, aktivitas pemantauan dan jumlah relawan pemilu cenderung menurun. Minimnya pengetahuan atas pentingnya pengawasan publik, jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, keterbukaan informasi tentang kepemiluan, pendanaan, inovasi teknologi informasi dalam pengawasan, dan intimidasi merupakan tantangan pemantauan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan umum tidak saja dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan semata. Namun juga sebagai tempat bagi rakyat untuk menunjukkan partisipasi politiknya. Pemilu berkualitas dapat terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Proses pemantauan dilaksanakan dari awal hingga akhir yaitu penetapan hasil pemilu.

Haryati (2015), Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana), dengan tujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada belum optimal karena belum diberi peran yang luas, masih merupakan lembaga ad hoc, dan pola rekrutmen yang belum baik. Disarankan, agar memperluas kewenangan Panwaslu, pembentukannya bukan sebagai lembaga ad hoc; dan pola rekrutmennya diperketat dengan persyaratan yang memadai. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Susila (2019). Dengan tujuan melihat Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun mendorong perluasan wilayah pengawasan. Pengawasan

partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap pemilu serentak. Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public servis quality*) dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

Melalui Latar Belakang tersebut di atas maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, pendekatan Public Relations Politik Bawaslu Buton Selatan dalam Kampanye Pemilu tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, Jalan Gajah Mada; Kel. Lakambau, Kec. Batauga, Kabupaten Buton Selatan. Adapun waktu penelitian selama 4 bulan terhitung dari Maret sampai Juni 2021. Dengan tujuan mendapatkan Informasi atau Data yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan /melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokument resmi lainnya (Sugiyono, 2013)

Penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang penekannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative (Agus, 2011). Berdasarkan metode penelitian yang digunakan tersebut, peneliti berharap mendapatkan data penelitian yang bersifat deskriptif interpretatif sehingga peneliti dapat menganalisis dan menelaah lebih dekat, mendalam, mengakar dan meyeluruh, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai publik relations politik badan pengawas pemilu buton selatan dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai adalah: (a) Dokument analysis digunakan untuk menelaah data yang telah ada baik yang berupa dokumen maupun records; dan (b) In-depth interview, wawancara mendalam dengan narasumber dalam hal ini adalah para pemangku jabatan di bawaslu buton selatan, stakholder terkait pengamat dan atau praktisi politik, dan komunikasi.

Subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya pada objek penelitiannya dapat mengamatai secara mendalam tentang aktifitas (activity), orang-orang (*actor*), tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2013).

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana teknik ini mendeskripsikan data-data yang ada, dan selanjutnya dijabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

Konsep kajian dijabarkan pada gambar berikut;

Konsep	Dimensi	Aspek Kajian	Pertanyaan
Pendekatan PR Politik	1. Pembangunan komunitas politik	➤ Membangun komunitas pengawasan	1. Bagaimana bawaslu buton selatan membangun komunitas pengawasan?
	2. Relasipolitik dan public	➤ Hubungan publik internal dan eksternal	2. Bagaimana cara bawaslu buton selatan dalam menjaga hubungan public internal dan publik eksternalnya?
	3. Paradigma Grunugian	➤ Mutual benefit (keuntungan bersama)	3. Bagaimana cara bawaslu buton selatan dalam membangun mutual benefit?

Gambar 1. Penjabaran Konsep Kajian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Komunikasi Politik

Dalam organisasi selalu ada tujuan. Begitu pula dengan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, kesadaran tentang pengawas pemilu yang minim secara jumlah dan banyaknya tugas maka focus perhatian bawaslu adalah bagaimana melakukan perencanaan yang matang agar seluruh masyarakat bisa menjadi bagian dari pengawas pemilu. Hal ini di ungkapkan oleh ketua bawaslu buton selatan bapak Mahyudin S.Sos M.Si dalam wawancara sebagai berikut:

“kesadaran kami untuk membangun komunitas pengawasan adalah bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu mengingat jumlah pengawas pemilu yang sangat kecil, kami di bawaslu hanya berjumlah tiga komisioner, panwas kecamatan juga berjumlah tiga komisioner, panwas desa dan kelurahan masing-masing satu di tengah mengawasi tahapan pemilu yang padat”

Dari wawancara tersebut alasan Bawaslu Buton Selatan untuk membentuk pengawas pemilu partisipatif adalah terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah anggota bawaslu di tengah tugas pengawasan pemilu yang banyak. Dalam hal ini bawaslu buton selatan untuk mencapai tujuan harus di tunjang oleh jumlah pengawas pemilu yang banyak pula. Dengan demikian maka bawaslu buton selatan membutuhkan pengawas partisipatif dari semua kalangan, baik itu masyarakat umum untuk menjadi aktif dalam pengawasan pemilu ataupun kelompok-kelompok atau komunitas yang bisa menjadi pengawas pemilu atau mengajak kelompok tersebut untuk terlibat aktif dalam mengawasi pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara Bersama anggota bawaslu buton selatan ibu Rosni S.IP menyatakan dala sebuah wawancara sebagai berikut:

“Kami sangat menyadari bahwa masyarakat harus ikut terlibat dalam melakukan pengawasn pemilu dengan dasar tersebut kami melakukan rapat dan diskusi dikantor melakukan perencanaan untuk membentuk komunitas-komunitas pengawasan atau kelompok pengawasn dalam pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Buton Selatan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bawaslu Buton Selatan melakukan rapat internal di kantor Bawaslu Buton Selatan Bersama seluruh ketua dan anggota dan staf bawaslu Buton selatan untuk menjadi membentuk komunitas-komuntas pengawas pemilu di bawaslu Buton selatan. Selajutnya, berdasarkan hasil wawancara Bersama ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Buton Selatan tentang Public Relations (Humas) Politik bawaslu buton selatan dalam pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut. Hasil wawancara Bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bapak Mahyudin. S.Sos. M.Si

“Keberadaan PR Politik atau humas dalam bawaslu sangatlah penting, mengingat tugas bawaslu sebagai lembaga independen sebagai pengawas pemilu tahun 2019, semakin tingginya kompetisi para caleg ataupun pendukung caleg dalam pemilu. PR Politik juga di

butuhkan untuk fungsi manajemen komunikasi sebagai alat antara bawaslu dan publik baik memberitahukan kepada para caleg maupun masyarakat buton selatan secara umum yang kami maksud dari PR Politik di bawaslu buton adalah melakukan rekrutmen, manajemen dan pengawasan baik itu di internal bawaslu maupun di luar kelembagaan bawaslu yang berhubungan erat dengan pemilu tahun 2019 langsung dengan tatap muka kepada publik”.

Berdasarkan wawancara terhadap ketua Bawaslu Buton Selatan sebagai informan 1 (satu) bahwa public relations politik Bawaslu Buton Selatan adalah dengan fungsi manajemen dan pengawasan komunikasi baik terhadap peserta pemilu, maupun terhadap masyarakat kabupaten buton selatan dalam hal ini adalah melakukan manajemen dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Hal tersebut di atas adalah bawaslu buton selatan dalam melakukan pengawasan dengan perencanaan yang matang seperti hal tersebut berkesesuaian dengan apa yang di ungkapkan Dalam melaksanakan Public Relations Politik sebaiknya juga memperhatikan model perencanaan public relations politik, seperti halnya dunia perusahaan dapat mengacu ke model perencanaan Jefkins dalam (Mulyana, 2013). Ini berlaku di semua situasi, tetapi yang membedakan politik adalah jumlah publik laten serta sadar dan aktif bisa dibilang lebih besar dari pada di pengaturan perusahaan, padahal pada dasarnya setiap orang dapat didefinisikan sebagai pemangku kepentingan dalam politik.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa segala hal yang di lakukan oleh bawaslu buton selatan yaitu dengan melakukan perencanaan yang matang dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Bawaslu Buton Selatan memahami bahwa tugas untuk mengawasi jalannya kampanye tahun 2019 adalah dengan melakukan manajemen dan pengawasan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut Schermerhorn, dalam (Iye, 2018a). Maka dengan demikian dalam melakukan perencanaan bawaslu buton selatan adalah untuk mencapai hasil kinerja yang telah di tetapkan dalam perencanaan dan tidak keluar dari perencanaan tersebut begitu pula dengan rencana bawaslu dalam merencanakan pembangunan komunitas pengawasan. Dalam hal ini pembangunan komunitas pengawasan bawaslu buton selatan telah melakukan proses manajemen yang baik untuk mencapai tujuan kinerja yang maksimal dengan memahami situasi dan kondisi.

Sedangkan Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa *non public* adalah masyarakat luas, masyarakat luas adalah Hal tersebut Hasil wawancara Bersama Ibu Rosni, S.IP, Koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga beliau menyatakan sebagai berikut :

“Di bawaslu buton selatan tentunya ada yang namanya PR atau hubungan masyarakat ini di buktikan ada koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dalam tugas-tugas pengawasan secara spesifik dan secara umum bawaslu adalah aktor PR Politik yg bertugas melakukan pengawasan jalannya kampanye pada pemilu. PR Politik adalah orang atau organisasi yang memiliki tugas dalam mengkomunikasikan peran yang ingin di sampaikan kepada publik agar merubah sikap untuk menghindari politik uang, dan politik sara dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 2 (dua) PR Politik bawaslu Buton Selatan adalah menyangkut tentang aktor PR yaitu tentang tugas pengawasan dan pengorganisasian agar berperan kepada public. Bawaslu Buton Selatan adalah lembaga yang mengedepankan pencegahan, pencegahan adalah tahapan awal dalam proses pengawasan dalam kampanye. Dalam agenda pencegahan ini hal yang paling penting di lakukan oleh bawaslu Buton Selatan adalah dengan melakukan sosialisasi. Hal ini seperti yang di ungkapkan Grunig dan Hunt dalam (Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, 2018) itu adalah model agen pers/publisitas, model informasi public, dan model dua arah taksimetris. Setiap model itu dibedakan berdasarkan tujuan yang ingin di capai. Meskipun humas mengembangkan fungsinya dengan melakukan komunikasi persuasive (pembujukan), tidak semua model digunakan harus digunakan melakukan persuasi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa yang di lakukan oleh bawaslu



buton selatan adalah melakukan sosialisasi dengan kegunaan agar mampu mempengaruhi public dengan cara mengajak atau membujuk public.

Wawancara kepada Ibu Rosni, S.IP, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kami bawaslu Buton Selatan menyadari benar bahwa tugas pengawasan pemilu di tahun 2019 dengan hanya beberapa personil maka akan lebih sulit maka dari itu kami membentuk komunitas-komunitas pengawasan misalnya kami membentuk desa pengawasan partisipatif di desa lawela, kecamatan bataug, Kegiatan yang kami lakukan adalah bagaimana membangun komunitas pengawasan misalnya kami sosialisasi Bersama mahasiswa, ibu-ibu BKMT adalah bagaimana komunitas ini harus menjadi bagian dari pengawasan dengan menjadikan komunitas tersebut sebagai pengawasan partisipatif”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut informan 2 (dua) menyatakan bahwa kesadaran sumber daya manusia yang minim maka yang di lakukan bawaslu dalam kaitannya terhadap pendekatan public relations politik adalah pendekatan pembangunan komunitas. Seperti halnya telah di jelaskan bahwa bawaslu buton selatan telah melakukan manajemen dan pengawasan maka situasi dan kondisi mengharuskan bawaslu Buton Selatan untuk membangun komunitas pengawasan untuk mendukung kinerja mengawasi jalannya kampanye pemilu tahun 2019. Berdasarkan kesadaran situasi bahwa bahwa personil bawaslu sangatlah minim maka yang di lakukan oleh bawaslu adalah dengan membangun komunitas pengawasan partisipatif yang tentunya di bawah binaan bawaslu buton selatan.

Hal yang sama pula di sampaikan oleh bapak Mahyudin, S.Sos. M.Si ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam sebuah wawancara dalam hal pembentukan komunitas pengawas pemilu tahun 2019. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Bawaslu Buton Selatan dalam pemilu tahun 2019 telah membentuk komunitas pengawasan berupa desa binaan pengawasan partisipatif di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dengan program yaitu desa belajar ilmu, desa anti politik uang, desa anti hoax, desa anti politik sara”

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari informan 1 (satu) bahwa pendekatan yang di gunakan oleh bawaslu Buton Selatan dalam kaitannya terhadap public relations politik bawaslu adalah pembangunan komunitas dengan tujuan untuk media pembelajaran, menjadi bagian pengawasan yang langsung di bina oleh bawaslu buton selatan. Selain itu juga, berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas adalah bawaslu buton selatan untuk mengajak untuk mencapai kinerja bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk mengawasi pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan. Dalam mewujudkan rencana program yang usahakan oleh bawaslu Buton Selatan adalah memberikan motivasi, sikap dan tindakan. Motivasi yang di lakukan oleh bawaslu Buton Selatan adalah dengan melakukan transfer ilmu.

Hasil wawancara Bersama bapak Hastun S.Pd. beliau mengatakan sebagai berikut:

“Desa Lawela adalah desa yang tepat untuk di jadikan desa binaan pengawasan partisipatif sekaligus desa percontohan bagidesa-deso lain di kecamatanbatauga. Mendorong kerajinan local dalam membangun kesadaran pengawasan dan saling bekerja sama yang baik dalam mewujudkan desa binaan pengawasan partisipatif yang sukses”

Sedangkan menurut informan 3 (tiga) pendekatan yang di lakukan bawaslu buton selatan dalam hal pendekatan public relations politik adalah pendekatan pembangunan komunitas dengan fungsi membangun Kerjasama Bersama Bawaslu Buton Selatan dan menjadi percontohan desa pengawasan partisipatif. Yang dilakukan oleh bawaslu Buton Selatan adalah untuk membina masyarakat desa Lawela Kabupaten Buton Selatan dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian bawaslu Buton Selatan akan melakukan pembinaan dengan melakukan transfer ilmu pengawasn partisipatif.

Dalam pembinaan tersebut ide dan gagasan bawaslu telah di salurkan hal tersebut di ungkapkan (K, & Aliyudin, 2019) Komunitas adalah bahwa di dalam komunitas, ide dan nilai tertentu dibagikan. Komunitas adalah “sekelompok orang yang secara sosial saling bergantung, yang berpartisipasi bersama dalam diskusi dan pengambilan keputusan, dan yang berbagi praktik tertentu yang mendefinisikan komunitas dan dipelihara olehnya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pembentukan komunitas pengawasan adalah adanya proses komunikasi dimana ide dan gagasan di bagikan dan komunitas pengawasan dan bawaslu memiliki ketergantungan dan rasa memiliki dalam rangka melakukan pengawasn kampanye pemilu tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan. Dalam melakukan pengawasan bawaslu Buton Selatan selain juga memberikan transfer ilmu juga transfer etika sehingga ketertrikn masyarakat desa lawela kecamatan batauga menjadi semangat dalam merasa memiliki komunitas pengawasan sehingga komunitas tersebut akan memberikan iklim yang baik terhadap organisasi pengawasan. Dengan memberikan iklim yang baik terhadap komunitas berupa transfer etika tersebut maka akan membentuk keharmonisan dalam melakukan melakukan tugas untuk mencapai tujuan komunitas tersbut.



Gambar 2. Rapat Koordinasi Bawaslu Buton Selatan Tentang Desa Binaan 2019

Dari hasil wawancara dan gambar tersebut, bawaslu Buton Selatan dalam pemilihan umum tahun 2019 telah membentuk komunitas pengawasan partisipatif di desa lawela, kecamatan batauga. bawaslu buton selatan telah melakukan manajemen untuk membentuk komunitas pengawasan partisipatif berupa perencanaan Pembentukan komunitas pengawasan juga telah membentuk komunitas pengawasan adalah untuk menunjang kinerja berupa transfer ide dan gagasan agar saling memiliki tanggung jawab kinerja bawaslu Kabupaten Buton Selatan dalam melakukan pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di kabupaten buton selatan. Yang sangat menarik dalam membentuk desa binaan Bawaslu Buton Selatan adalah memilih desa Lawela Kecamatan Batauga sebagai desa pengawasan partisipatif dimana desa tersebut adalah pintu gerbang masuknya kabupaten Buton Selatan dari kota baubau, desa lawela adalah desa pertama kali kita temui dari kota baubau. Hal tersebut secara geografi sangat baik dan menunjang pengawasan pemilu sebab jarak tempuh antara kota baubau dan kabupaten buton selatan sangat rentan pengaruh pelanggaran pemilu.

Pembentukan komunitas pengawasan Desa Lawela kecamatan Batauga Kabupaten Buton selatan adal sebagai bentuk komitmen kerja Bawaslu Buton Selatan agar desa Lawela menjadi desa yang sadar akan pemilihan umum tanpa pelanggaran serta kesadaran masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawas pemilu maka dengan demikian pembentukan komunitas pengawasan adalah menjembatani hubungan bawaslu dalam menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas segala program pengawasan dan tujuan bawaslu Buton Selatan.

Relasi Politik dan Publik

Konsep pendekatan *politic relation with public* memiliki kata kunci *key audience*, pendekatan ini berpendapat bahwa terdapat tokoh-tokoh kunci yang mampu mempengaruhi suara publik.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada ketua dan anggota Bawaslu Buton Selatan di temukan data sebagai berikut: Hasil Wawancara terhadap anggota Bawaslu Buton Selatan Bapak Hastun. S.Pd. Beliau menyatakan sebagai berikut :

“Strategi bawaslu buton selatan dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye secara garis besar adalah penguatan SDM Bawaslu Buton Selatan berupa raker ataupun rakor di internal bawaslu. Sedangkan di luar organisasi bawaslu yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat contoh misalnya sosialisasi di pemilih pemula, kemudian di kalangan pengawasan partisipatif, anti politik uang, anti politik sara dan hoax dan beberapa kami rapat bersama beserta stake holder, misalnya partai politik, pemerintah daerah, KPU,kepolisian, kejaksaan. dalam momentum pemilihan umum tahun 2019 di buton selatan, bawaslu harus mampu melakukan hubungan baik pada semua public. Baik relasi public internal maupun relasi public eksternal agar tujuan Bersama dapat kita capai, dalam hal public internal bawaslu buton selatan selalu melakukan rakor Bersama staf dan anggota panwascam guna membangun sumber daya manusia untuk kebaikan internal dalam melakukan pengawasan dan beberapa kali juga kami mengundang kpu, kejaksaan, pemerintah daerah baik itu sekedar diskusi formal misalnya kami undang mereka membawakan materi mapun diskusi yang bersifat biasa agar hubungan antar lembaga semakin baik”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 3 (tiga) di temukan sebuah data bahwa tokoh kunci dalam public internal adalah pengawas pemilu kecamatan yang mejadi ujung tombak bawaslu Buton Selatan dalam melakukan pengawasn pemilu tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan. Untuk mencapai tujuan Bersama dalam mensukseskan pengawasn pemilu di butuhkan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan maupun antara anggota seluruh pengawas pemilu dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan. Dalam melakukan hubungan komunikasi internal ini berguna untuk merekatkan hubungan yang baik di internal pengawas pemilu dengan cara pertemuan atau rapat. Rapat adalah agenda yang selalu menjadi tumpuan bawaslu Bersama panwas kecamatan untuk menjadi satu keluarga besar pengawas pemilu untuk melakukan pengawasn pemilu yang penuh semangat dan berkualitas agar terciptakan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan menjadi bermartabat. Pendekatan tersebut adalah bagian dari usaha bawaslu dalam melakukan pendekatan public relations politik bawaslu di internal bawaslu buton selatan. pendekatan public relations politik bawaslu buton selatan adalah hubungan politik dengan public dimana bawaslu melakukan rapat baik itu internal bawaslu.

Dalam rapat tentunya adalah penguatan kelembagaan dengan melakukan koordinasi, dalam rapat tersebut adalah merekatkan hubungan antar individu dan individu lainnya. Hal Hubungan dengan public internal (internal public) atau hubungan internal(internal relations), merupakan hubungan yang tercipta dalam organisasi melalui komunikasi antar individu yang merupakan pemangku kepentingan (stakeholder). Hubungan bawaslu dalam public internal adalah hubungan antara atasan dan bawahan misalnya rapat koordinasi bawaslu dan panwascam. Hal tersebut dilakukan agar membangun hubungan yang terikat. Selain itu juga, hal tersebut di lakukan agar hubungan antara atasan dan bawahan semakin erat agar tujuan dalam melakukan pengawasan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya (Nurussa'adah, E., & Sumartias, 2017).

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Hubungan dapat terbentuk antara manusia yang bersifat manusiawi yang di kenal dengan human relations, hubungan juga dapat terbentuk antara organisasi dengan individu, antara organisasi dengan organisasi lain, atau organisasi dengan public atau masyarakat (Jackson and Lilleker, 2015). Public di artikan sebagai individu-individu yang di ikat oleh kepentingan dan minat yang sama terhadap suatu masalah berdasarkan hal tersebut bahwa hubungan public Bawaslu Buton Selatan untuk membangun public relations di internal adalah dengan rapat dimana dalam rapat tersebut semua didiskusikan karena terikat pada tugas yang sama maka hubungan antar atasan dan bawahan adalah hubungan yang terikat oleh pekerjaan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja dengan tujuan



membangun hubungan yang baik serta membangun sumber daya manusia dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan. Selain itu juga, hubungan internal Bawaslu adalah hubungan institusional dimana hubungan yang terjadi selain hubungan antara atasan dan bawahan juga adalah hubungan antara badan pengawas pemilu tingkat kabupaten dan panitia pengawas pemilu kecamatan. Sehingga yang menjadi fokus institusional tersebut adalah adanya anggota, staf yang disebut personalia juga dalam hubungan institusi memiliki struktur, perencanaan, program, penghasilan dalam hal ini adalah gaji dan fasilitas pendukung yang menjadi penghubung hubungan tersebut.



Gambar 3. Rapat Koordinasi Bawaslu Buton Selatan 2019

Hasil Wawancara terhadap Ketua Bawaslu Buton Selatan, Bapak Mahyuddin S.SosM.Si beliau menyatakan sebagai berikut :

“Setiap organisasi memiliki tujuan begitu pula dengan Bawaslu Buton Selatan. Strategi Bawaslu adalah penguatan SDM berupa rapat dalam Bawaslu dan penguatan hubungan bersama stake holder serta memperbanyak sosialisasi pengawasan dan melakukan penindakan bagi orang atau peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 (satu) di temukan data bahwa public relations politik Bawaslu Buton Selatan dengan pendekatan hubungan terhadap public. Dalam melakukan hubungan masyarakat dalam tahapan kampanye tahun 2019 Bawaslu Buton Selatan mengedepankan hubungan persuasif dengan stake holder dengan melakukan ajakan berupa rapat bersama. Dalam sosialisasi Bawaslu membutuhkan persiapan argumentasi yang baik agar mampu mempengaruhi audiens. Misalnya Bawaslu Buton Selatan mengajak seluruh stakeholder untuk netral dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagai bentuk hubungan Bawaslu terhadap public eksternal dan juga melakukan rapat koordinasi bersama partai politik. Di mana hubungan tersebut adalah membangun hubungan Bersama stakeholder.



Gambar 4. Rapat Koordinasi Bawaslu Buton Selatan 2019

Dari gambar 4., bahwa hubungan bawaslu juga melakukan hubungan bersama stake holder dengan melakukan rapat koordinasi. Dalam gambar tersebut juga ada peserta pemilu dalam hal ini yang di maksud oleh peserta pemilu adalah partai politik. Adapun tujuannya adalah untuk memaksimalkan hubungan antar lembaga untuk menghadapi tahapan kampanye.

Hasil wawancara Bersama anggota Bawaslu Buton Selatan Ibu Rosni S.I.P. beliau menyatakan sebagai berikut :

“Untuk mencapai tujuan pengawasan maka Bawaslu Buton Selatan melakukan rekrutmen anggota misalnya panwas kecamatan hingga pengawas TPS, jika bawaslu rapat bersama pemda maka anggota di tingkat bawaha juga melakukan hal yang sama misalnya bertemu kepala desa, tokoh ada di desa, BPD agar maksud dan tujuan pengawasan itu tercapai”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 2 (dua) tersebut di atas, pendekatan public relations politik bawaslu adalah dengan hubungan public. Baik itu public internal maupun public eksternal. Public eksternal bawaslu adalah public yang berada dalam struktur bawaslu buton selatan namun berhubungan erat dalam aktifitas. Hasi wawancara Bersama ibu Rosni S.I.P menyatakan sebagai berikut:

“Kami sangat berhubungan baik dengan berbagai pihak misalnya KPU, PEMDA, kepolisian untuk menciptakan pemilu yang berintegritas berupa kadang kami yang mengundang untuk rapat Bersama untuk berdialog dan silaturahmi di kantor bawaslu”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bawaslu Buton Selatan menyadi bahwa untuk mencapai tujuan maka yang harus di bangun adalah pendekatan hubungan antar Lembaga atau stakeholder. Hubungan tersebut atas dasar merekatkan hubungan tersebut. Dalam hal ini bawaslu buton selatan telah melakukan hubungan public eksternal. Dalam hubungan eksternal Bawaslu Buton Selatan beberapa kali melakukan rapat Bersama dengan public eksternal. Selain itu juga, Bawaslu Buton Selatan memahami bahwa tokoh kunci dalam melakukan tujuan besar di luar awaslu adalah partai politik, PEMDA, KPU dan semua unsur yang saling terkait. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh anggota Bawaslu Buton Selatan bapak Hastun S.Pd dalam wawancara sebagai berikut;

“dalam melakun tugas pengawasan pemilu hal kami lakukan adalah melakukan hubungan terkait beruapa tokoh kunci dalam pemilihan umum seperti KPU, PEMDA, kepolisian,

kejaksaan dan lain sebagainya yang terkait dengan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa bawaslu Buton Selatan adalah Lembaga pengawas pemilu yang menjaga hubungan dengan Lembaga lainnya. Pemilihan umum adalah momentum memilih calon pemimpin di butuhkan kebersamaan dalam mewujudkan hal tersebut. Selain itu juga, Bawaslu Buton Selatan memahami bahwa untuk mencapai tujuan adalah dengan menjaga dan membangun hubungan dengan baik Bersama tokoh kunci tersebut. Langkah awal untuk merekatkan hubungan adalah dengan melakukan rapat dengan cara dialogis. Dalam rapat maka semua pembahasan akan baik. Sebagaimana hasil wawancara Bersama ketua bawaslu buton selatan bapak Mahyudin S.Sos M.Si sebagai berikut:

“Alhamdulillah pertemuan atau rapat kami Bersama stake holder misalnya partai politik berjalan dengan baik di pemilu tahun 2019 kemarin salah satu hasil komunikasi yang di bangun adalah partai politik mengirimkan saksi partai politik dan saksi calon untuk kami latih sebagai saksi jadi beban tersebut tidak lagi partai politik yang memikirkan untuk melatih saksi mereka”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah dalam melakukan hubungan public eksternal bawaslu buton selatan sudah di lakukan. Bawaslu buton selatan dalam melakukan hubungan public internal adalah dengan mengundang rapat Bersama, membahas tujuan utama untuk mensukseskan pemilihan umum yang berintegritas di Kabupaten Buton Selatan. Dalam hal ini bawaslu buton selatan sangat memahami bahwa tokoh kunci pemilu adalah partai politik. Maka dengan pendekatan dialogis terdapat hasil komunikasi yang baik dimana bawaslu buton selatan melatih saksi partai politik maupun saksi calon legislative. Hal tersebut menandakan bahwa dalam membangun hubungan public eksternal bawaslu buton selatan sangat sangan mengedepankan hubungan yang harmonis. Membangun hubungan public eksternal adalah untuk mencapai tujuan yaitu agar terciptanya pemilihan umum yang berintegritas. Selain itu, hubungan public eksternal bawaslu sudah sangat baik di kernakan mampun mempengaruhi partai politik untuk melakukan Kerjasama yang baik dalam tahapan kampanye pemilu. Salah sato contohnya adalah partai politik menyerahkan bawaslu buton selatan ununtuk melakukan pembinaan dan pelatihan saksi partai politik. Hal tersebut menandakan bahwa bawaslu buton selatan telah mampu mempengaruhi partai politik dalam berkomunikasi dalam rapat Bersama.

Dalam rapat terdapat komunikasi berupa interaksi maka yang menjadi pokok perhatian adalah adanya adu argumentasi dalam rapat tersebut untuk saling mempengaruhi. Maka ketika terdapat kesepakatan Bersama bawaslu Buton Selatan telah mampu membangun hubungan public eksternal. Hasil wawancara Bersama ibu Rosni S.IP mengatakan sebagai berikut:

“dalam rapat Bersama partai politik suasana sangat cair ada masukan dan ada pembahasan pemilu namun juga terkadang di sela-sela pembahasan kami sangat santai bahkan tertawa agar suasana semakin bersahabat”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa Bawaslu Buton Selatan dalam membangun hubungan eksternal dalam hal ini adalah partai politik sangat menjaga arah komunikasi dengan persiapan retorika yang matang sehingga dapat mempengaruhi audiens yaitu partai politik. Hal yang kontras yang kita lihat dimanapun bahwa Ketika partai politik maka pembahasan sangat berat dan terlihat kaku. Namun, bawaslu buton selatan telah membuat suasana cair dalam rapat tersebut. Bawaslu Buton Selatan telah mampu mempengaruhi peserta pemilu. Dalam rapat terdapat komunikasi. Komunikasi tersebut sangat banyak dan model maka bawaslu telah melakukan komunikasi interaksional sehingga Nampak tidak formal dan memahami situasional yaitu memahami kondisi dan situasi yang ada. Selin itu, hal yang tampak menarik dalam hasil wawancara tersebut di atas adalah partai politik biasanya melatih sendiri segala hal yang berhubungan dengan di luar partai politik. Partai politik atau calon legislative biasanya adalah merekrut dan melatih sendiri saksi calon. Namun pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Buton selatan partai politik menyerahkan saksi untuk di latih oleh bawaslu buton selatan. Hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa bawaslu buton selatan telah mampu membangun public eksternal dengan mampu mempengaruhi partai politik untuk di latih oleh bawaslu buton selatan.



Dengan demikian menurut penulis bawaslu buton selatan telah membangun hubungan politik dengan public. Baik itu public internal maupun public eksternal.

Paradigma Politik Grunugian

Dalam pendekatan ini yang menjadi kata kunci adalah mutual understanding dan win-win solution, dalam pendekatan ini yang paling penting adalah mencari solusi dari masalah Bersama dengan melakukan pertemuan Bersama *stakeholder* yang ada di Buton Selatan. Seperti halnya di ungkapkan oleh ibu Rosni S,IP anggota Bawaslu buton selatan dalam wawancara:

“dalam pengawasan pemilu yang paling penting adalah melakukan pencegahan dan pencegahan di mulai dengan melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang terkait misalnya KPU, PEMDA, KEPOLISIAN, PARPOL untuk Bersama menolak kampanye hitam, HOAX, SARA, Politik Uang dan pelanggaran lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan data bahwa dalam mencari solusi Bersama maka yang di lakukan bawaslu buton seltan adalah melakukan pertemuan rapat Bersama pihak terkait dalam momentum pemilihan umum tahun 2019. Pertemuan tersebut adalah dalam rangka mencari solusi Bersama dari kebanyakan persoalan pemilihan umum. Masalah yang sering terjadi dalam pemilu adalah kampanye hitam, berita hoax, isu sara, many politik. Begitupula di kabupaten buton selatan masalah pemilihan umum salah satunya adalah politik uang. Hasil wawancara Bersama ketua bawaslu Buton Selatan bapak Mahyudin S.Sos M.Si adalah sebagai berikut:

“berkaca pada pilkada tahun 2017 masalah yang terjadi di kabupaten buton selatan adalah many politik maka yang kami lakukan pada pemilu tahun 2019 adalah melakukan pertemuan Bersama partai politik, kepolisian, pemda, kpu dan lain sebagainya yang terkait untuk menolak segala bentuk pelanggaran pemilu yang di dalamnya adalah menolak many politik pada pemilu tahun 2019 di buton selatan sebagai Langkah untuk melakukan pencegahan pada pengawasn kampanye pemilu tahun 2019 di kabupaten buton selatan ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di ketemukan data bahwa langakah bawaslu dalam menukan win-win solusi adalah melakukan pertemuan berupa rapat. Rapat yang di lakukan Bawaslu Buton Selatan adalah dengan menemukan solusi dari permasalahan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilihan pada tahun 2017 di Kabupaten Buton Selatan adalah many politik. Berkaca pada kondisi tersebut maka bawalu buton selatan mencari solusi Bersama pihak terkait. Pihak terkait dalam hal ini adalah kpu, pemerintah daerah, kepolisian dan lain sebagainya untuk membicarakan solusi dari persoalan Bersama pada tiap momentum pemilihan ataupun pemilihan umum. Maka dengan melakukan pertemuan tersebut bawaslu Buton Selatan memberikan solusi berupa kegiatan Bersama tolak *many politik*, isu sara, black kampagne, berita hoax. Hasil wawancara Bersama hastun S.Pd anggota bawaslu buton selatan sebagai berikut:

“Kegiatan yang kami lakukan Bersama kepolisian, pemda adalah dengan tolak kampanye hitam, anti berita hoax, stop isu sara dan tolak politik uang ”

Berdasarkan hasil wawncara tersebut adalah bawaslu melakukan kegiatan tolak politik uang, anti berita hoax, tolak kampanye hitam bersama pihak terkait bersama kepolisian, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah bentuk awal dari sebuah pencegahan pelanggaran pemilu. Maka kegiatan tersebut adalah bagian dari wiwn-win solusi untuk mencegah pelanggaran pemilu agar keluar dari masalah Bersama. Oleh sebab tersebut maka sebagai Langkah untuk keluar dari masalah Bersama dalam pemilihan umum kegiatan tersebut di laksanakan. Selain itu juga, bawaslu dan publik memiliki jalan keluar atas masalah yang terjadi langkah bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 yang dapat terlihat dengan melakukan rekrutmen pengawas pemilu dan di sampaikan secara terbuka dalam bentuk pengumuman menjadi pengawas pemilu

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan Bersama ketua dan anggota bawaslu buton selatan. Dapat di temukan beberapa data sebagai berikut misalnya,

Hasil wawancara terhadap Bapak Mahyudin S.Sos M.Si, beliau menyatakan sebagaiberikut :
“Dalam pemilu tahun 2019 selain komisioner dan staf Undang-undangpun mengamanatkan untuk melakukan rekrutmen panitia pengawas kecamatan atau panwascam dan itulah yang

juga membantu tugas-tugas pengawasan yang di biayai oleh negara kerana di atur dalam undang-undang”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 1 (satu) bahwa bawaslu dapat di temukan data bahwa Bawaslu Buton Selatan melakukan pendekatan public relations dengan paradigma grunugian. Dalam krisis pengawasan maka bawaslu melakukan perekrutan anggota baik itu staf dan pengawas pemilu kecamatan

Hasil wawancara terhadap anggota bawaslu buton selatan ibu Rosni S.IP. beliau menyatakan sebagai berikut :

“Kami juga melakukan hubungan yang baik kepada peserta pemilu yakni partai politik, seperti yang kita tahu bahwa partai politik karena kita ketahui bersama bahwa merekalah yang bersaing dalam arena politik pemilu tahun 2019 dengan begitu kongkritnya adalah bawaslu, panwaslu mengadakan pelatihan saksi partai politik maupun saksi caleg agar hubungan terjalin dengan baik dengan menciptakan solusi seperti itu agar saksi juga paham tentang pemilu serta terapat keterhubungan antara bawaslu dan partai politik ataupun caleg sehingga tidak menjadi masalah di dalam pemilu”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 2 (dua) dapat di temukan data yaitu pendekatan yang di lakukan oleh bawaslu Buton Selatan adalah mencari win-win solusi dalam hal ini sesuai dengan pendekatan paradigm Grunugian.

Hasil wawancara terhadap bapak Hastun S.Pd., beliau menyatakan sebagai berikut:

“Langkah awal dalam melakukan pengawasan adalah bagaimana semua pihak tidak melanggar undang-undang pemilu yang merupakan acuan Bersama kita dalam kontestasi pemilihan umum. Olehnya itu, dalam hal melakukan pengawasan kami selalu dengan koordinasi dan sosialisasi dengan banyak berdialog pada semua pihak olehnya itu Target bawaslu buton selatan adalah bagaimana mensukseskan pemilihan umum tahun 2019 dengan pemilu yang bersih, aman dan jujur sesuai UU no. 7 tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan dengan membuat kegiatan rapat koordinasi maupun rapat kerja teknis Bersama stakeholder agar dapat Bersama-sama mengawasi pemilu dan kegiatan tersebut di faslitasi penuh oleh bawaslu buton selatan baik teknis dan materi agar tercipta kemanfaatan bersama”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 3 (tiga) di temukanlah data hasil wawancara dengan membangun komunikasi bersama stakeholder agar mencapai tujuan bersama dalam pemilu tahun 2019 dengan membangun koordinasi dan rapat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas kata kunci paradigm grunugian adalah dengan mencari solusi bersama dalam sebuah masalah. Dalam pandangan ini tentunya adalah bagaimana saling menguntungkan misalnya dalam melakukan perekrutan panwascam terbuka dalam informasi. Hal ini bagi semua warga buton selatan memiliki hak yang sama untk mengikuti bagi yang memenuhi persyaratan. Dalam hal ini bawaslu buton selatan selalu mengedepankan asas keterbukaan. Konsep keterbukaan merupakan bagian dari keadilan dimana kemudian bila di lakukan secara tertutup maka akan menjadi masalah dalam perekrutan panitia pengawas kecamatan.

Maka untuk menciptakan rasa keadilan bawaslu buton selatan dalam melakukan rekrutmen anggota secara terbuka dan transparan. Kemudian, dalam hubungan bersama partai politik bawaslu selalu membangun komunikasi berupa rapat koordinasi bersama agar hubungan dalam agenda kampanye tidak terdapat pelanggaran. Tugas bawaslu adalah melakukan pengawasan dan penindakan dalam hal tersebut di atas yang di inginkan adalah bagaimana mengikuti undang-undang pemilu agar tidak terjadi pelanggaran. Bawaslu buton selatan jika menemukan pelanggaran maka akan terjadi kerugian di pihak lain misalnya akan di proses sesuai undang-undang pemilu. Selain itu, Rapat koordinasi adalah momentum semua stake holder untuk membangun hubungan dengan komunikasi antar individu yang kemudian terbangun kesepakatan bersama dalam kampanye pemilihan umum tahun 2019.

Dalam rapat koordinasi tentunya ada sebuah dialog. Yang di bangun dalam sebuah dialog adalah sebuah kejujuran agar tujuan masing-masing organisasi mencapai tujuannya. Misalnya, bawaslu buton selatan melakukan pelatihan saksi partai mapun caleg, tentunya dalam melakukan

pelatihan saksi tersebut ada proses dialogis dalam memahami undang-undang pemilu dan mencari solusi berupa kesepakatan dalam konteks penafsiran. rujukan bersama tersebut berupa rujukan itu adalah undang-undang pemilu sehingga tidak menimbulkan masalah dalam proses kampanye pemilu.

Paradigma Grunigian tidak selalu bergantung pada alat PR tertentu, tetapi berusaha menjadi strategis di alam, mengatasi masalah besar yang dihadapi (Kemal, 2021). Inti dari pendekatan ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan dialog. Awalnya sudut pandang ini menyarankan bahwa secara normatif setiap umpan balik harus simetris dua arah Grunig dan Hunt dalam (Efriza, 2019), meskipun ini kemudian diubah untuk mengakui bahwa ini mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi dalam semua situasi (Kriyantono, 2012). Dalam ubungan tersebut di atas adalah hubungan dialogis, timbal balik dan dua arah. Melalui proses tersebut berarti saling melakukan komunikasi untuk saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Dalam konsep interaksi maka yang di lakukan adalah komunikasi dua arah untuk menemukan titik temu. Maka dengan demikian menurut penulis bawaslu buton selatan telah melakukan pendekatan public relations dengan paradigma Grunugian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa (a) Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah melakukan pendekatan public relations politik dengan membangun komunitas politik. Dengan melakukan hal tersebut di atas komunitas pengawasan selalu menjadi mitra strategis guna melakukan pengawasan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan; (b) Bawaslu Buton Selatan telah menggunakan pendekatan public relations politik dengan public. Hal ini dengan terlihat dengan mengembangkan public internal dan public eksternal. Public internal dengan melakukan rapat kerja dengan membangun sumberdaya pengawasan dan hubungan public eksternal berupa sosialisasi aturan perundang-undangan yang berlaku dan ; (c) Bawaslu Buton Selatan telah melakukan pendekatan public relations dengan pendekatan paradigm Grunugian dengan menjaga hubungan harmonis dan saling membangun diskusi dialogis Bersama untuk menyukseskan pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten buton selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. (2011). *Metodologi Penelitian*. Andi Offset.
- Kamal, A. M., Darmawan, W. B., & Agustino, L. (2021). Strategi Komunikasi Politik PKS Jawa Barat Dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1184-1192.
- Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66-78.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran(4th ed.)*. Pustaka Pelajar.
- Effendy, O. U. (2004). *Dinamika Komunikasi* (PT Remaja).
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Public. *Politica*, 10(1).
- Iye, R. (2018a). *TUTURAN DALAM PROSESI LAMARAN PERNIKAHAN DI TOMIA KABUPATEN WAKATOBI*. 6, 183-199. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/ttbng.v6i2.88>
- Iye, R. (2018b). *TUTURAN EMOSI MAHASISWA KOTA BAUBAU DALAM RANAH DEMONSTRASI. TOTOBUANG*, 6(1), 125-138.
- Jackson and Lilleker. (2015). Just Public Relations or an Attempt at Interaction. *European Journal of Communication*, 19(3).
- Jayanti, M., & Subyantoro, S. (2019). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa pada Teks di Media Sosial. *Jurnal Sastra Indonesia*. <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i2.33718>
- Kriyantono, R. (2012). *Public relations dan Krisis Manajemen*. Kencana Prenada Media Grup.
- Muchtar, K., & Aliyudin, A. (2019). Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 69-90.
- Mulyana. (2013). *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Nurussa'adah, E., & Sumartias, S. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43-52.



- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2), 154–161.
- Siregar, A. I. U. (2020). *Penggunaan Media Sosial pada Pemilih Pemula dalam Partisipasi Politik Pasca Pemilihan Presiden 2019 di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Alfabeta.

